**SEGMEN 1**

**KETUA KPU (Arief Budiman)**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 bapak haji Joko Widodo dan bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, bapak haji Prabowo Subianto dan bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno sekalian yang berbahagia.

Malam ini menjadi salah satu malam yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya kita menyelenggarakan kampanye debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan gegap gempitanya jadwal kampanye Pemilu Legislatif.

Masing-masing Pasangan calon akan diberikan kesempatan yang sama untuk memaparkan visi misi dan program mereka secara mendalam tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Tidak hanya penting dan strategis bagi Pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga bagi pemilih yang berdaulat memilih akan memiliki kesempatan yang luas untuk memahami dan menjadikan pemaparan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden malam ini sebagai salah satu referensi penting, saat menggunakan hak konstitusionalnya pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.

Debat yang dilaksanakan malam ini sangat strategis untuk mendukung cita-cita mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Itu biasa, perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam demokrasi yang bermanfaat. Pemilih berdaulat, negara kuat, selamat menikmati debat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**Visi Misi Jokowi-Ma'ruf**

**Jokowi:** Bismillahirohmannirohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, pimpinan KPU dan Bawaslu. Yang saya hormati bapak Prabowo Subianto, dan bapak sandiaga Uno kawan baik saya. Yang saya hormati Bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin.

Bapak ibu yang saya hormati, visi kami adalah hidup bisa maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan.

Saya berkeyakinan, semakin maju, semakin demokratis dan modern sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan politik yang penting. Tetapi pemenuhan hak ekonomi, hak sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia.

Seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses permodalan, dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan Hak Asasi Manusia yang paling dasar. Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu, tidak mudah menyelesaikannya. Karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian dan waktu yang terlalu jauh.

Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini. Dan untuk menjamin hak-hak tersebut negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik, melalui reformasi kelembagaan, dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki.

Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi, yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerjasama menguatkan KPK serta mendorong sinergi antara KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

Dan terakhir, kita tetap harus waspada terhadap ancaman terorisme. Pemerintah terus bekerja keras, pendekatan penegakan hukum yang tegas dan pendekatan yang persuasif lewat pembinaan agama, ekonomi, dan sosial.

**Visi Misi Prabowo-Sandi**

**Prabowo:** Bismillahirromanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom om swastiastu, namo buddhaya.

Hadirin hadirot yang saya hormati. Calon nomor satu yang saya hormati dan saya banggakan, serta saudara sekalian.

Visi misi kami, kami beri nama Indonesia Menang. Indonesia menang karena sekarang kita rasakan indikator-indikator menunjukkan bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak begitu menguntungkan.

Di dunia ini ada 200 negara kurang lebih, 30 disebut sangat berhasil, 30 sangat tidak berhasil dan miskin, sisanya berada di tengah-tengah. Ciri khas negara yang berhasil adalah harus swasembada pangan, air bersih. Dan juga lembaga-lembaga pemerintahan harus kuat, terutama lembaga-lembaga penegak hukum. Hakim jaksa dan polisi harus unggul, dan harus baik, dan harus tidak boleh sama sekali diragukan integritasnya. Karena itu kami dalam menghadapi masalah hukum, masalah korupsi, masalah HAM, dan masalah terorisme, kami ingin menyelesaikan dari muara masalah.

Muara masalah menurut kami adalah adalah, kita harus menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang mengambil keputusan, sehingga dia tidak bisa dikorupsi. Dia tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyokong dan akan mempengaruhi dia. Ini strategi kami. Kita bisa mengatasinya secara represif, tapi menurut kami masalahnya harus berakar dari akar masalah.

Kita harus gaji hakim kita begitu hebat, sehingga dia tidak akan terpengaruh, demikian jaksa, demikian polisi. Untuk itu kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia.

Itu saya kira strategi utama kita. Kita yakin dengan lembaga-lembaga yang bersih, yang kuat, kita bisa menegakkan kepastian hukum. Hukum untuk semua, bukan bukan hukum untuk orang-orang kuat atau orang-orang kaya saja. Saya kira itu tekad kami. Keadilan untuk semua, keamanan untuk semua, kemakmuran untuk semua.

**Sandiaga**: Hukum yang tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hukum yang menghadirkan kepastian, sehingga bisa membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja.

Juga kita pastikan hukum tersebut menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengeluh, dan itu PR kita. Dan bersama Prabowo sandi *insyaallah* kita tegakkan hukum, kita pastikan tidak ada korupsi lagi.

**Segmen 2**

**Menjawab Pertanyaan dari Panelis**

**Hukum dan HAM**

**Amplop B**

**Pertanyaan:** Kepastian hukum sangat penting bagi warga, pelaku usaha, dan jalannya pemerintahan. Namun ternyata banyak peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih, serta tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat serta daerah. Apa strategi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut?

**Jawaban Prabowo**: Kami akan menegakkan badan pembinaan hukum nasional, kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik, untuk melakukan sinkronisasi, penyelarasan sehingga Undang-Undang, peraturan peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan-peraturan di daerah.

Ini sulit, ini pekerjaan besar, tapi harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum. Supaya semuanya tahu sistem hukum di Indonesia, dan hukum itu bekerja untuk semuanya.

**Tambahan Sandi**: Partisipasi publik juga sangat penting. Kami akan melibatkan para ahli, baik dari universitas di pusat maupun di daerah. Karena banyak sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Jadi kami akan memastikan bahwa pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh pemimpin utama yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Kami akan bertanggungjawab untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum. Sehingga, kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan, bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat.

Kami ingin juga pastikan bahwa hukum itu bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi. Untuk membuka lapangan kerja. Negeri yang kaya raya ini, negeri yang luar biasa gemah ripah loh jinawi ini masih menyisakan banyak masalah. Lapangan kerja susah didapat, peluang usaha susah dilakukan oleh masyarakat karena ketidak pastian hukum.

Di bawah Prabowo-Sandi, hukum harus ditegakkan dan dalam waktu yang singkat harus kita sinkronkan dan ciptakan harmonisasi. Kepastian hukum akan meningkatkan investasi, lapangan kerja akan tercipta, kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat. Kami berkomitmen kepastian hukum ini akan menjadi prioritas di bawah Indonesia Menang.

Prabowo-Sandi, adil makmur di periode 2019-2024.

**Tanggapan Jokowi**: Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Penting sekali harmonisasi regulasi kita. Oleh sebab itu kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi. Baik yang ada di GBHN, di Dirjen Perundang-Undangan, dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian.

Akan kita gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional. Sehingga kontrol langsung oleh presiden, satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Perda-Perda yang ada di daerah-daerah juga harus berkonsultasi, agar tidak tumpan tindih. Konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional. Yang kedua, akan kita sederhanakan semuanya. Sehingga apabila ada tumpang tindih, langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik.

**Tanggapan Balik Prabowo:** Kalau saya *kok* tidak lihat perbedaannya. Karena memang pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelarasan dan juga untuk melakukan perbaikan, kemudian juga menghasilkan produk-produk itu. Ini tugas pemerintah.

Pemerintah adalah, presiden adalah *Vice Law Enforcement Officer*. Adalah penanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum. Itu tanggung jawab Presiden. Jadi saya tidak mempersoalkan itu. Tapi yang jelas kenyataannya sekarang tumpang tindih, menumpuk begitu banyak peraturan.

Perlu ada bantuan pakar-pakar untuk membantu pemerintah. Mempercepat ini masalah semua. Kita ingin percepatan urusan. Selalu di Indonesia masalah terlalu banyak, masalah terbesar. Kita ingin terobosan-terobosan, itu jawaban saya

**Amplop A**

**Pertanyaan:** Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM. Dalam konteks seperti apa penegakan hukum harus dikedepankan, dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian. Jawaban harap menuju pada kasus-kasus konkret agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi.

**Jawaban Jokowi**: Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur, itu bukan pelanggaran HAM. Misalnya penahanan terhadap tersangka, memang itu merampas kemerdekaan seseorang. Tapi penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya, ditahan, itu bukanpelanggaran HAM. Itu memang prosedur dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti.

Yang kedua, mungkin calon tersangka tidak melarikan diri. Dan jika ada pelanggaran hukum, yang melanggar prosedur, penindakan hukum yang melanggar prosedur. Silakan, ada mekanisme yang bisa kita tempuh, lewat praperadilan misalnya. Jadi sekali lagi jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM. Mungkin pak kyai [Ma'ruf] bisa menambahkan.

**Tambahan Ma'ruf**: Ya saya sudah menambah. Saya mendukung pernyataan Pak Jokowi.

**Tanggapan Prabowo**: Kami ingin bertanya, bahwa bapak *kan* sudah memerintah selama empat tahun lebih. Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah.

Sebagai contoh kalau ada kepala daerah, gubernur gubernur yang mendukung paslon nomor satu itu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan pak, ditangkap. Jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil, juga menurut saya pelanggaran HAM, karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh undang-undang dasar pak. Jadi sebetulnya siapapun boleh menyatakan pendapat, dukungan siapapun. Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan, mungkin juga ada anak buah bapak yang mungkin berlebihan.

**Tanggapan Jokowi**: Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum. Jangan kita ini, kita ini sering grusa-grusu untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya apa jurkamnya Pak Prabowo, misalnya ini, katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Ini negara hukum, kalau ada bukti-bukti, silakan lewat mekanisme hukum. Laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok. Gampang sekali. Negara hukum ini. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu.

**Amplop E**

**Pertanyaan:** Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan, dan pandangan politik. Namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM, apa strategi Anda untuk mengatasi masalah masalah ini?

**Jawaban Prabowo:** Tadi saya sudah katakan, dalam sistem bernegara seorang kepala negara disebut *vice excecutive*, kepala eksekutif. Berarti seorang kepala negar. Presiden adalah, tadi saya sebut *Vice Law Enforcement Officer*. Dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini.

Karena itu saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum, saya akan instruksikan, saya akan tegaskan bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun, agama apapun, etnis apapun. Jadi intinya adalah, aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif. Jadi kita harus jamin kalau ada pejabat yang menyimpang saya akan pecat.

**Tambahan Sandi:** Dalam kunjungan ke seribu titik, lokasi, bertemu masyarakat saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris. Bahwa ada Kisah Pak Najib, seorang nelayan di pantai pasir putih Cilamaya, di Karawang. Beliau mengambil pasir untuk menanam di *mangrove*, di hutan bakau. Beliau dipersekusi, dikriminalisasi.

Banyak persekusi dan kriminalisasi ini tidak terpantau, dan hanya kita lihat yang besar-besar saja yang naik. Sementara kasus-kasus yang berdampak kepada masyarakat, orang-orang kecil, *wong cilik* tidak ditangani dengan baik.

Di bawah Prabowo-Sandi hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil. Kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka, jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan, tapi melindungi kawan.

Kita pastikan hukum ini tegak lurus. Supremasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia. Di bawah Prabowo-Sandi HAM akan kita tegakkan, dan ini harga mati buat kita. Adil makmur bersama Prabowo-Sandi.

**Tanggapan Jokowi:** Keragaman, perbedaan-perbedaan, baik beda suku, beda agama, beda tradisi, beda bahasa daerah adalah sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi hukum Allah yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia. Dan aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan. Aset terbesar bangsa ini ada persatuan. Aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan.

Oleh sebab itu saya selalu mengajak, marilah kita menjaga *ukhuwah islamiyah* kita, menjaga *ukhuwah fathoniyah* kita. Karena persatuan, persaudaraan adalah aset terbesar bangsa yang kita cintai ini. Kalau memang ada persekusi, tadi Pak Sandi *nuduh-nuduh* lagi. Ya, gampang sekali. Laporkan. Saya akan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut.

**Tanggapan Sandi:** Pak presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh.Yang kami sampaikan adalah cerita-cerita yang kami tampung dalam kunjungan kita bertemu dengan masyarakat.

Kami ingin menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat, hak asasi manusia kita pikir definisi-definisi yang besar. Tapi untuk masyarakat kecil itu adalah hak mendapatkan lapangan pekerjaan.

Seperti dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2. Bahwa setiap masyarakat wajib mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Itu yang ingin kami hadirkan.

Kami ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya. Rakyat berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Mereka menginginkan mata pencaharian dan biaya yang terjangkau. Prabowo-Sandi akan berpihak kepada rakyat. Prabowo-Sandi akan memastikan bahwa HAM juga mencakupi akses terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, dan terhadap mata pencaharian yang baik. Demikian bapak presiden.

**Amplop C**

**Pertanyaan:** Kelompok penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi terkait dengan kesejahteraan fasilitas publik, serta hak-hak politik. Bagaimana anda memahami itu disabilitas, dan apa program anda untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas?

**Jawaban Jokowi:** Setelah keluar Undang-Undang mengenai penyandang disabilitas di tahun 2016, saya melihat bahwa paradikma terhadap kaum disabilitas ini sudah berubah. Yang sebelumnya adalah bantuan sosial, adalah kedermawanan, yang harus kita berikan kepada mereka, tetapi yang sekarang dengan undang-undang yang baru, kita melihat paradigmanya adalah pemenuhan hak-hak. Pemerintah, kita sudah memberikan fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan hak itu. Baik pemenuhan hak untuk pekerjaan, untuk perumahan, untuk fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas, meskipun juga baru beberapa kota, tetapi sudah kita mulai.

Kemudian juga yang berkaitan dengan kesetaraan, bisa saya berikan contoh. Di dalam *event* Asian para games, ini event disabilitas terbesar di Asia. Kita juga memberikan bonus yang sama dengan atlet yang berlaga di Asian Games. Contoh misalnya, yang mendapatkan emas dapat dapat 1,5 milyar. Yang dapat perak bisa kita berikan bonus 500 juta. Yang dapat perunggu kita berikan bonus 250 juta. Sama seperti atlet-atlet yang berlaga di Asian Games. Artinya bahwa kesetaraan itu betul-betul kita berikan kepada kaum disabilitas yang mulai sekarang ini kita terus perhatikan mereka.

**Tanggapan Sandi:** Zulfan Dewantara. Seorang teman difabel, yang kami temui adalah inspirasi Prabowo-Sandi. Beliau bukan mencari lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Beliau menjadi mentor bisnis online dari ratusan murid. Kesetaraan tadi bukan hanya kesetaraan akses infrastruktur, atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Tetapi juga akses untuk bisa maju, mendapat peluang untuk membuka lapangan pekerjaan.

Prabowo-Sandi berkomitmen, kita akan memastikan putra-putri terbaik bangsa yang difabel hidup untuk memenuhi potensinya. Mereka bukan menjadi beban sama sekali. Mereka tidak butuh belas kasihan. Mereka butuhkan kesetaraan. Memastikan agar mereka bisa mendapatkan peluang lapangan pekerjaan. Peluang untuk hidup yang lebih baik, dan peluang untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera. Terima kasih.

**Tanggapan Jokowi:** Ya saya kira contoh-contoh seperti yang dikatakan Pak Sandi tadi banyak sekali. Tidak hanya di satu bidang, tapi banyak bidang. Kaum disabilitas itu betul-betul sekarang ini sudah setara. Artinya kita sangat menghargai semua prestasi yang telah mereka kerjakan dan juga hasil-hasil, karya yang telah mereka kerjakan. Saya tadi, apa yang disampaikan Pak Sandi mirip-mirip dengan yang sudah saya sampaikan tadi.

Tambahan Ma'ruf: Saya kira yang penting lagi membangun budaya masyarakat untuk memberikan penghormatan kepada kelompok disabilitas. Menyamakan perlakuannya baik disabilitas maupun non-disabilitas. Nabi sendiri pernah ditegur oleh Allah .... [waktu habis].

**SEGMEN III**

**Menjawab Pertanyaan Panelis**

**Korupsi dan Terorisme**

**Amplop A**

**Pertanyaan:** Untuk menduduki jabatan publik, seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan. Apa strategi Anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi Ini?

**Jawaban Jokowi:** Prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis pada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme. Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas. Dan untuk jabatan-jabatan politik, perlu sebuah penyederhanaan sistem, di dalam sistem kepartaian kita. Sehingga Pemilu menjadi murah.

Pejabat-pejabat tidak terbebani biaya Pemilu. Sehingga kita harapkan kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi, dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik. Dan kita harapkan dengan rekrutmen-rekrutmen ini, jabatan-jabatan baik itu Bupati, baik itu Wali Kota, Gubernur, dan seterusnya kita akan mendapatkan putra-putri terbaik. Karena memang rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat.

Dan sekarang memang sudah kita lakukan. Contoh, rekrutmen ASN atau PNS kita. Semua berjalan dengan transparan, akuntabel, dan semua orang bisa cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ, karena memang tidak lulus. Terima kasih.

**Tanggapan Prabowo:** Jadi kalau kami menilai bahwa perlu ada langkah-langkah yang lebih praktis, konkret, dan segera. Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya delapan juta. Kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah, yang lebih besar dari Malaysia. Dengan APBD yang begitu besar.

Jadi ini hal-hal yang tidak realistis. Jadi saya kira seorang kepala pemerintah, eksekutif, kalau benar-benar niat memperbaiki itu, kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar. Kemudian kita potong semua kebutuhan-kebutuhan kampanye. Sebagai contoh TV adalah milik rakyat, dunia maya. Jadi nggak boleh perlu banyak bayar, untuk muncul di TV-TV, demikian juga radio, baliho-baliho... [waktu habis]

**Tanggapan Jokowi:** Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen yang berdasarkan kompetensi, bukan finansial itu menjadi kunci. Tapi *kan* contoh, saya sendiri, pada saat pemilihan Wali Kota, saya betul-betul menggunakan anggaran begitu sangat kecil. Ke partai pun, waktu pemilihan Gubernur di DKI Jakarta saya tidak mengeluarkan uang sama sekali.

Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu. Ketua partai pendukung pun juga tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang. Memerlukan proses yang panjang. Artinya apa? Pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan. Bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik tanpa mengedepankan finansial.

**Amplop D**

Pertanyaan: Birokrasi merupakan ujung tombak negara untuk memenuhi hak-hak warga dan pembenahan birokrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Bagaimana langkah-langkah anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi?

Jawaban Prabowo: Berkali-kali saya sampaikan di ruang publik. Akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri, para birokrat-birokrat itu kurang. Tidak realistis. Kalau saya memimpin pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis. Kemudian bertanya, uangnya dari mana? Saya akan tingkatkan *tax ratio* yang sekarang berada di 10 persen, bahkan lebih rendah.

Saya akan kembalikan ke minimal ke minimal 16 persen *tax ratio*. Berarti kita akan dapat mungkin minimal 60 milyar dolar lebih. Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua pejabat, birokrat, dan semua pegawai negeri.

Saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin kebutuhan-kebutuhan dia. Kalau dia masih korupsi, ya kita harus tindak sekeras-kerasnya. Ya kalau perlu kita contoh tindakan-tindakan drastis negara-negara lain. Kita taruh di mana, mungkin di pulau yang terpencil. Suruh tambang pasir terus-menerus mungkin.

Jadi kita perbaiki penghasilannya. Itu yang kita perlukan. Tidak tidak masuk akal, pejabat begitu penting penghasilannya sedikit. Tetapi sesudah itu kita awasi dengan ketat, dengan segala senjata, instrumen, perangkat yang kita miliki. Inspektorat, pengawasan-pengawas. Tadi saya sebut kejaksaan, polisi, KPK. Kami akan perkuat KPK. Kami akan bikin KPK di daerah-daerah, di provinsi-provinsi. Kami akan tambah anggaran KPK. KPK harus menjadi penegak, antikorupsi di Republik Indonesia ini.

**Tambahan Sandi:** Benahi pencatatan aset negara. Penting.

**Tanggapan Jokowi:** Saya tidak setuju apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena kita tahu gaji ASN kita, PNS kita saat ini menurut saya cukup. Dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting kalau menurut saya sekarang adalah perampingan birokrasi.

Kemudian ada *merit system*. Rekrutmen putra-putri terbaik melalui *merit system*, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensi, sesuai dan integritas, sesuai dengan prestasi, sesuai dengan rekam jejak. Kemudian juga ada pengawasan internal yang kuat. Ini penting sekali pengawasan internal. Dan juga tentu saja pengawasan eksternal, baik dari masyarakat, baik dari media, saya kira ini penting sekali. Baik dari Komisi ASN. Penting sekali pengawasan internal ini bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih. Terima kasih.

**Tanggapan Jokowi:** Ya saya kira, terus masalahnya yang saya lihat, saya pelajari dari banyak negara, adalah tadi walaupun aja tuh, jangan ada macam-macam yang disebut untuk kinerja. Tapi tetap ada ketakutan para birokrat akan masa depan mereka. Jadi di situlah terjadi sikap ragu-ragu, dan sikap tidak kuat mendapat godaan, tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum.

**Tambahan Sandi:** Yah, dengan membenahi pencatatan aset negara, saya pengalaman waktu di DKI bahwa kita bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Itu digunakan dengan memotivasi para ASN, menggunakan teknologi informasi. Kalau kita sudah tahu aset kita, mungkin akan lebih sulit untuk dikorupsi ke depannya.

**Amplop B**

**Pertanyaan:** Pemberantasan terhadap terorisme seringkali berbenturan dengan isu Hak Asasi Manusia. Bagaimana strategi Anda agar pemberantasan terorisme bisa benar-benar dijalankan, tanpa ada persepsi dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM. Harap jawab, dapat merujuk pada kasus-kasus yang konkret agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi.

**Jawaban Ma'ruf:** Terorisme adalah merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad. Oleh karena itu haram dilakukan, bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan, *ifsad*. Dalam Alquran dinyatakan bahwa orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum dengan keras, dengan berat.

Oleh karena itu upaya-upaya menanggulangi terorisme harus dilakukan dengan dua cara: mensinergikan cara pencegahan dan penindakan. Ke depan kami lebih mengutamakan pencegahan melalui kontra-radikalisme untuk menghilangkan atau menekan, faham-faham radikal dan intoleran. Dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar.

Untuk itu di dalam melakukan tindakan kami juga akan melakukan pendekatan yang humanis, yang manusiawi, dengan tidak harus melanggar HAM, Hak Asasi Manusia. Untuk itu dalam menanggulangi terorisme di masa yang akan datang kami akan mengajak ormas-ormas, organisasi masyarakat khususnya organisasi keagamaan.

**Tambahan Jokowi:** Saya melihat bahwa aparat harus diberi pengetahuan mengenai HAM.

**Tanggapan Prabowo:** Jadi waktu saya masih muda, saya spesialisasinya adalah di bidang antiteror. Saya yang bentuk, bersama dengan Pak Luhut Panjaitan, pasukan antiteror yang pertama. Jadi saya mengerti, saya paham. Masalahnya adalah, karena pengalaman saya itu, saya mengetahui bahwa seringkali terorisme ini adalah dikirim dari negara lain. Dan sering juga dibuat *nyamar*. Seolah-olah teroris itu dari orang Islam, padahal itu sebetulnya dia itu bukan dikendalikan oleh orang yang mungkin juga bukan orang Islam. Mungkin juga orang asing, ataupun bekerja untuk orang asing. Saya mengerti benar-benar.

Jadi, stigmatisasi bahwa seolah-olah radikal itu selalu dicap kepada orang Islam, saya menolak itu. Saya setuju deradikalisasi, saya dukung usaha-usaha kemanusiaan.

**Tanggapan Jokowi:** Ya negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh oleh negara-negara lain dalam menangani terorisme. Kita tidak hanya melalui pendekatan-pendekatan hukum yang tegas. Tetapi juga ada pendekatan yang persuasif, melalui pembinaan agam, pembinaan ekonomi dan sosial. Tetapi yang paling penting menurut saya aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM.

Aparat harus tahu mengenai HAM. SOP juga harus berbasis HAM. Dan Undang-Undang terorisme yang sudah ada di 2018 yang lalu itu juga menitikberatkan pada pencegahan. Pada pendekatan sosial. Pada pendekatan ekonomi. Pada pendekatan budaya. Pada pendekatan keagamaan. Dan juga yang lebih penting, juga ada transparansi saat proses penindakan. Sehingga menjadi jelas.

**Amplop E**

**Pertanyaan:** Terorisme dan radikalisme demakin menjadi ancaman. Karena itu dibutuhkan langkah pencegahan dan deradikalisasi. Hal ini bukan hanya bagi individu yang sudah terpapar paham terorisme dan keluarganya, tetapi juga lingkungan yang menjadi lahan subur berkembangnya paham ini. Apa strategi Anda untuk menjalankan program pencegahan dan deradikalisasi yang efektif?

**Jawaban Prabowo:** Tadi saya sebut bahwa banyak terorisme yang merupakan penyusupan dari luar, yang terus ke dalam negeri, menurut pendapat saya adalah akibat rasa ketidakadilan. Rasa keputusasaan. Mereka melihat perlakuan yang tidak baik, tidak benar. Mereka merasa tersakiti. Dengan demikian mereka bisa dipengaruhi oleh pengajar-pengajar ataupun paham-paham yang radikal dan mengarah pada kekerasan.

Jadi saya sangat mendukung setiap usaha deradikalisasi pendidikan. Untuk itu prabowo-sandi, manakala kita yang memimpin pemerintahan, kita akan benar-benar investasi besar-besaran dalam pendidikan, dalam kesehatan. Untuk membantu rakyat yang paling bawah, rakyat paling miskin. Kita akan bantu pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, guru-guru di mana-mana harus kita perbaiki kapasitasnya. Kualitas hidupnya. Dengan demikian mereka yang akan bisa mempengaruhi pendidikan, pengajaran, pembangunan iklim yang terbaik untuk suasana, tidak putus asa. Suasana tidak merasa tidak merasa benci, tidak merasa tersakiti.

**Tambahan Sandi:** Ya, kita juga harus melihat program-program kontra-radikalisasi pada masyarakat luas. Bagaimana kita melakukan kontrak-ideologi, kontra-narasi, dan juga kita lakukan kontra-propaganda. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa merasakan masa depan yang cerah, akhirnya terpapar karena kebutuhan ekonominya.

Oleh karena itu Prabowo-Sandi akan melihat peta-peta di mana risiko ini timbul. Berdasarkan ideologi, motivasi, dan psikologinya. Kita harus hadir untuk mereka untuk memastikan mereka tidak terjerumus pada terorisme. Itu yang menjadi komitmen adil makmur bersama Prabowo-Sandi

**Tanggapan Ma'ruf:** Deradikalisasi itu, dari mereka yang sudah terpapar, mengembalikan ke jalan yang lurus. Oleh karena itu caranya adalah, apa yang menyebabkan dia menjadi radikal. Kalau itu karena paham keagamaan yang menyimpang, maka yang harus kita doktrinkan, bagaimana meluruskan paham keagamaannya, yang menyimpang itu.

Tetapi kalau itu disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja, dan juga santunan yang bisa mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Saya kira ini yang harus kita kaji betul, kenapa dia menjadi radikal.

**Tanggapan Prabowo:** Ya, tadi sudah kita singgung ya, sebab musabab terorisme. Dan untuk itu Indonesia, negara kita harus kuat. Kita harus kuat, dan tadi kita harus swasembada pangan, tidak boleh tergantung bangsa lain. Energi, air, dan kekuatan Angkatan Perang kita harus kuat. Polisi kita harus kuat. Intelijen kita harus kuat.

Kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme. Jangan menunggu. Ini perlu investasi. Ini perlu. Saya merasa bahwa ya, ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin kelengahan banyak pemerintah, tetapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi, intelijen, dan angkatan bersenjata, angkatan perang kita harus kita perkuat. Supaya kita bisa tahan, kita bisa mendahului, mencegah terorisme.

**Segmen IV**

**Tanya Jawab Antarkandidat**

**Tema Hukum dan HAM**

**Jokowi Tanya, Prabowo Jawab**

**Pertanyaan Jokowi:** Terima kasih. Dalam visi-misi Bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender dan pemberdayaan perempuan. Akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur kepengurusan partai yang bapak pimpin, jabatan-jabatan strategis seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekjen, Bendahara semuanya laki-laki. Bagaimana bapak menjawab inkonsistensi ini?

**Jawaban Prabowo:** Baik, saya ingin jelaskan partai kami adalah partai muda, partai baru. Kami baru berdiri kurang lebih 10 tahun, dan pada saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau untuk muncul.

Tetapi, benar yang bapak sebut, tapi yang di eselon-eselon seperti contoh, Wakil Ketua Umum, saya kira cukup. Kita punya Wakil Ketua Umum ibu Rahmawati Sukarnoputri, beliau bertanggungjawab untuk ideologi. Kita juga punya beberapa Wakil Ketua Umum lainnya, kemudian kita punya sayap partai yang namanya Perempuan Indonesia Raya. Dan kita punya susunan Caleg, saya kira mungkin terbanyak dari seluruh partai pak.

Undang-undang kalau tidak salah mewajibkan 30 persen, kita mungkin sudah mendekati 40 persen. Mungkin tidak sampai 40, tapi sudah mendekati dan itu tekad kami. Jadi kita memang mengakui ini adalah suatu perjuangan. Kita belum puas, tapi kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk *emak-emak,* perempuan, untuk bergerak. Dan sekarang pendukung kita yang paling keras adalah di *emak-emak* seluruh Indonesia. Saya kira demikian.

**Tambahan Sandi:** Saya bukan Gerindra lagi pak. *Nggak* bisa jawab, pak. Kecuali bapak angkat lagi pak.

**Tambahan Prabowo:** *Nggak*, jangan-jangan.

**Tanggapan Jokowi:** Ya sebetulnya saya tidak harus menjawab lagi karena Pak Prabowo sudah mengakui. Tetapi bahwa apa yang sudah diakui tadi, kalau saya boleh membandingkan mohon maaf, misalnya di kabinet saya.

Saat saya membentuk kabinet, ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat-tempat strategis. Misalnya, Menlu. Itu adalah Menteri Luar Negeri [perempuan] pertama. Kemudian menteri BUMN, menteri Keuangan. Kemudian Menteri LHK. Kemudian menteri yang berani dan nekat, Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan saya juga pernah membentuk yang namanya Pansel KPK. Terdiri dari sembilan orang yang semuanya perempuan. Dan mereka bisa memilih komisioner yang paling baik.

**Tanggapan Prabowo:** Baik, saya kira itu sah. Tetapi juga, sekarang masyarakat juga menilai beberapa yang bapak tadi banggakan justru yang menunjukkan suatu kerugian-kerugian besar bagi kepentingan bangsa dan rakyat.

Jadi, menurut saya kita jangan permasalahkan orang demi orang. Yang kita memasalahkan adalah kebijakan-kebijakan yang dia hasilkan, yang diprodukkan. Jadi kalau dibilang masalah gender, oke kita cari. Kita bisa hitung jumlah, tapi kalau kita bilang *output*, ya kita bisa berdebat lagi.

Kita bisa berdebat lebih lama lagi. Jangan hanya perempuan diangkat jadi kita bangga, harus perempuan tapi juga cakap, dan prorakyat. Dan tidak perempuan mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Ini masalahnya. Jadi saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan. Kalau dia perempuan tapi dia tidak membela rakyatnya sendiri, ya saya kira tidak perlu dibanggakan.

**Prabowo Tanya, Jokowi Jawab**

**Pertanyaan Sandi**: Seperti kita ketahui, banyak hukum yang masih tumpang tindih. Dan salah satu dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di masyarakat, bahwa bagaimana, apalagi bapak sudah empat tahun bekerja, untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru, seperti penunjukan-penunjukan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik. Itu ditanyakan oleh masyarakat. Bagaimana investasi bisa meningkat, kalau ada kepastian hukum yang terus dipertanyakan. UKM sulit untuk berkembang. Banyak sekali UKM yang menanyakan kepastian hukum.

Kami ingin menanyakan kepada bapak, bagaimana untuk memastikan ini terjadi seandainya bapak mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk lima tahun ke depan, sementara bapak sudah empat tahun menunjukkan ketidakberhasilan untuk kepastian hukum, dan benturan kepentingan hadir di mana-mana.

**Jawaban Jokowi:** Saya akan lakukan revisi-revisi Undang-Undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM kita. Kita akan revisi banyak sekali Undang-Undang yang tidak pro kepada investasi.

Kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat kita. Karena menurut saya hukum adalah bagaimana negara ini bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus bisa memberikan kepastian kepada investasi dan dunia usaha. Dan hukum juga tidak tebang pilih. Dan hukum betul-betul bisa memberikan rasa tenteram, rasa nyaman kepada seluruh rakyat Indonesia.

**Tambahan Ma'ruf:** Program kami ke depan adalah melanjutkan reformasi di bidang hukum secara total. Salah satunya adalah penataan regulasi. Penataan regulasi itu menghilangkan yang tumpang tindih dan membuat regulasi peraturan yang berkualitas, yang menguntungkan dan akan memberikan peluang terhadap investasi dan pengembangan UKM.

**Tanggapan Prabowo:** Jadi yang kita permasalahkan adalah bagaimana yang bapak sebut tadi. Presiden Jokowi tadi sebut aparat-aparat yang tidak mengayomi itu. Sekarang masalah yang kita ingin tanya itu bagaimana, karena bapak sudah memimpin selama empat tahun.

Jadi bagaimana, apa yang kita tunggu adalah apa yang bisa dilakukan segera, sehingga tidak terjadi yang seperti, yang kita khawatirkan semua itu. Sehingga terjadilah sekarang kesan bahwa penegakan hukum, keadilan itu hanya untuk orang kuat, orang kaya. Orang yang punya koneksi. Dan tadi ditanya oleh Wakil Presiden saya, *insyaallah*, jadi ditanya adalah bagaimana tanggapan bapak yang kalau jabatan-jabatan penting itu diserahkan kepada kader yang aktif dari partai-partai politik. Dan bukan seorang yang benar-benar netral.

**Tanggapan Jokowi:** Saya kira kita tidak boleh mendiskriminasi. Bahwa sebuah jabatan itu harus diberikan kepada, tidak kepada orang partai atau tidak harus kepada seorang profesional.

Menurut saya jabatan itu yang paling penting, seperti tadi sudah saya sampaikan, ada sebuah *merit system.* Ada sebuah proses rekrutmen yang betul. Proses rekrutmen yang transparan, proses rekrutmen yang mengacu pada kompetensi. Kepada integritas. Kepada kapasitas.

Banyak *kok* aparat hukum yang berasal dari partai, yang dalam memimpin juga sangat baik dan legendaris. Misalnya Pak Baharudin Lopa, itu dari PPP nyatanya memimpin Kejaksaan juga bisa sangat baik. Kenapa harus dibedakan ini yang partai ini yang non-partai. Saya kira sama saja buat saya, yang penting proses rekrutmennya benar.

**Segmen V**

**Saling Bertanya Antarkandidat**

**Tema Korupsi Nepotisme**

**Prabowo Tanya, Jokowi Jawab**

**Pertanyaan Prabowo:** Kita mengetahui bersama bahwa masalah korupsi dan konflik kepentingan ini sangat erat hubungannya. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan bapak tentang konflik kepentingan ini.

Apakah bapak bisa meyakini dan menjamin bahwa pejabat-pejabat yang bekerja untuk bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok atau bisnis dalam kebijakan-kebijakan yang diambil terutama dalam impor-impor beras gula dan komoditas komoditas yang sangat dirasakan merugikan petani- petani kita terima kasih waktu

**Jawaban Jokowi:** Pertama saya akan mulai dari saya Pak Prabowo. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu, sehingga enak dalam memberikan perintah-perintah, tidak ada kepentingan-kepentingan pejabat yang kami angkat. Kalau memang ada dan bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, dilaporkan saja pak polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke Kejaksaan, kalau memang ada buktinya.

Tetapi bahwa pemerintah kami ingin, ingin semuanya sederhana, semuanya mudah, seperti yang telah kita bangun yaitu *online single submission* sebagai contoh. Dengan *online single submission* ini yang dulunya kalau orang ingin mencari izin sampai bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, izin sekarang, bapak sebagai pengusaha, coba *ke online single submission*, coba bapak datang.

Bapak tunggu dua jam, bisa langsung memulai usaha. Inilah yang kita lakukan yaitu memperbaiki sistem sehingga peluang untuk terjadinya korupsi tidak ada, ada transparansi di situ, ada keterbukaan di situ, ada manajemen pengawasan yang ketat, *manajement control*, kalau bapak memiliki bukti-bukti kuat, silakan dilaporkan.

**Tanggaoan Prabowo:** Pak Jokowi yang saya hormati, yang membingungkan kami adalah, di anatara menteri-menteri bapak itu berseberangan, ada yang mengatakan produksi persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang mau impor beras, jadi ini yang membingungkan kami, jadi kami bertanya kepada bapak.

Jadi bagaimana pejabat yang bapak angkat, termasuk, Dirut Bulog, Pak Buwas [Budi Waseso] mengatakan bahwa cukup, kemudian Menteri Pertanian bapak mengatakan cukup, tapi menteri perdagangan bapak mengizinkan impor komoditas pangan yang begitu banyak, ini yang membingungkan rakyat dan kami.

Ini masalah pemerintahan bapak sendiri diantara pejabat-pejabat yang bapak angkat, karena itu kami tanya kepada bapak, apakah Bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan. Itu saja pak.

Tanggapan Jokowi: Ya kalau ada perbedaan-perbedaan itu saya kira dalam dinamika, sebuah apa, di rapat-rapat menteri-menteri itu saling debat saya persilakan, saya dengarkan, ada yang mau impor ada yang mau tidak impor, tetapi kalau sudah diputuskan bahwa kalau menteri sama semuanya menurut saya malah *nggak*, tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek, tidak ada saling mengawasi, penting sekali sekarang ini.

Tidak usah semua menteri itu sama semuanya, berbeda *nggak* apa-apa, debat di rapat gapapa kok, nggak ada masalah. Nanti kalau sudah rampung debatnya barusan saya putuskan, impor atau tidak kita putuskan, saya rasa biasa menteri-menteri saya dengan situasi situasi seperti itu, buat saya bukan sesuatu yang tidak baik malah baik karena ada saling kontrol dan masyarakat juga tahu.

**Jokowi Tanya, Prabowo Jawab**

**Pertanyaan Jokowi:** Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium empat, meskipun ini saya *nggak* setuju. Tapi menurut ICW, partai yang bapak pimpin termasuk yang terbanyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu Caleg itu yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan.

Bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini?

**Jawaban Prabowo:** Baik, itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat laporan itu, dan benar-benar itu sangat subjektif. Ya saya tidak, saya tidak setuju itu. Saya seleksi Caleg-Caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami.

Begini pak, begini pak, ada juga kadang-kadang tuduhan-tuduhan korupsi yang korupsinya ya menerima THR seluruh DPRD-nya semuanya lintas partai pak. Kalau kita sekarang cek di Kejaksaan, boleh kita bandingkan, berapa orang sekarang yang sudah menunggu masuk KPK atau masuk penjara, kita bisa cek, janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing.

Saya jamin partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya, kalau ada anggota Partai Gerindra ada yang korupsi maka saya yang akan *masukin* ke penjara sendiri. Pokoknya kita anti korupsi.

**Tanggapan Jokowi:** Mohon maaf Pak Prabowo, jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi, yang Bapak calonkan sebagai Caleg, itu ada. ICW memberikan data itu jelas kali, ada enam yang bapak calonkan, dan yang tanda tangan dalam Pencalegan itu adalah ketua umumnya dan sekjen, artinya bapak tanda tangan.

**Ira Koesno (menyahut):** Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya untuk memberikan tanggapan?

**Jokowi Melanjutkan Tanggapan:** Jadi mohon maaf Pak Prabowo, saya tidak, saya tidak menuduh partai Bapak korupsi, *nggak,* Ini mantan koruptor, mantan napi korupsi yang sudah dihukum.

**Tanggapan Prabowo**: Jadi mantan korupsi, saya kira, pelajari, ini demokrasi Pak. Kita umumkan ke rakyat. Kalau rakyat memilih ya, *nggak* akan dipilih, yang jelas pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum.

Kalau memang hukum mengizinkan kalau dia masih dianggap masih bisa, dan rakyat menghendaki dia karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga *nggak* seberapa. Mungkin dia karena, begini, kalau curi ayam benar itu salah, kalau merugikan rakyat triliunan, itu yang saya kira harus kita habiskan di Indonesia saat ini.

**Segmen VI**

**Pernyataan Penutup Masing-masing Kandidat**

**Pernyataan Penutup Jokowi-Maruf**

**Jokowi:** Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan.

Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya masalah korupsi.

Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini. Terima kasih. Cukup, kami ingin bekerja.

**Pernyataan Penutup Prabowo-Sandi**

**Prabowo:** Saudara-saudara sekalian, kepastian hukum, penegakan hukum, institusi-institusi hukum, terutama hakim, jaksa, dan polisi adalah prasyarat bagi suatu negara yang berhasil. Untuk itu kami apabila menerima mandat dari rakyat, hal ini yang akan kami perkuat, hal ini akan kami perbaiki terutama kami akan bicara realistis untuk orang supaya kuat, supaya tidak korup, ini yang harus kita bangun penyelesaiannya.

Jadi yang kami ingin adalah cara penyelesaian akar masalah. Kita tidak mau cari kesalahan kecil-kecil ini atau kita mau mengatakan ini salah itu salah siapa yang salah, tidak. Kami melihat ini persoalan bangsa. Kami ingin menyelesaikan akar masalah. Karena itu kami bertekad untuk menghentikan kebocoran.

Kami bertekad menaikkan *tax ratio*. Kami yakin negara ini sangat, sangat kaya tapi terjadi kebocoran-kebocoran. Kekayaan-kekayaan kita mengalir keluar negeri, ini bukan salah siapa saja, ini salah kita bersama, sebagai bangsa, dan kesalahan yang membiarkan ini sudah puluhan tahun kita mau cari masalah jalan keluarnya.

Kita perbaiki, kita lipat gandakan gaji-gaji hakim, jaksa, dan polisi, dengan demikian kita berharap akan ada lembaga hakim, lembaga polisi, lembaga jaksa, tidak dapat dikorupsi. Sehingga mereka menjadi pilar, sehingga kita bebas dari korupsi.